

GENDER DAN FEMINISME: PERKEMBANGAN HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER

Septianis Afipah¹, Yoga Dwiyanto²

¹Universitas Al-Ghifari. Jl. Cisaranten Kulon No.140, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293

²Universitas Jenderal Achmad Yani. Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531

Corresponding Address: yogadwiyanto02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membahas mengenai permasalahan gender dan feminisme dalam Hubungan Internasional, dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang juga cukup besar dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan gender dan feminisme yang terjadi di dunia internasional, terutama di beberapa negara berkembang. Pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakan pada saat ini, hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mendalami subjek permasalahan secara lebih mendalam melalui pemahaman gender dan feminisme dalam Hubungan Internasional. Penjelasan pada penelitian ini juga akan disajikan secara deskriptif, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, yakni menggunakan beberapa sumber literatur seperti buku dan jurnal sebagai bahan untuk mencari data-data yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Kesimpulannya, gender dan feminisme tidak dapat dipisahkan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut dikarenakan perempuan juga memiliki peran yang besar dalam perkembangan Hubungan Internasional Kontemporer, perempuan dengan beberapa aliran feminisanya menginginkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Keywords: *Gender, feminism, big role, equal rights*

PENDAHULUAN

Kelahiran ilmu yang membahas mengenai hubungan internasional atau hubungan antar negara menjadi sesuatu yang sangat fenomenal, dalam hal ini kemunculan fokus studi tersebut menjadi sebuah pembahasan besar di antara para cendekiawan yang mulai mendalami hal-hal terkait hubungan antar negara. Studi atau pembelajaran mengenai hubungan antar negara cukup menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat di sekitar, sehingga pada akhirnya para ahli mulai bermunculan untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan negara-negara yang ada di dunia.

Kelahiran Ilmu Hubungan Internasional diikuti oleh perkembangan politik yang terjadi di sekitar wilayah Eropa dan pada akhirnya menyebar di seluruh dunia, dalam hal ini kita mengenal Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Pada perjanjian tersebut terdapat beberapa yang mendukung kelahiran Ilmu HI seperti konsep baru mengenai kedaulatan negara-bangsa (*nation state*), pemilik kedaulatan yang sah pada suatu wilayah menyadari posisi mereka dalam batas-batas kedaulatan, serta terdapat pelebagaan kekuatan militer dan diplomasi (Amsir, 2021). Keberadaan atau kelahiran negara-bangsa yang disebut negara modern pasca Perjanjian Westphalia memiliki pengaruh besar dalam tatanan politik dunia, pada akhirnya terbentuk sebuah tatanan masyarakat internasional yang tidak lagi didasari oleh paham gereja, imperium, maupun kerajaan, namun mulai terintegrasi pada dasar negara nasional. Pada akhirnya setelah Perjanjian Westphalia ini hubungan antar negara mulai berkembang dengan munculnya revolusi industri, perkembangan dalam konsep hukum internasional, konsep *representative government*, perkembangan metode diplomasi yang dilaksanakan di samping kekuatan militer, tumbuhnya interdependensi atau ketergantungan antar negara dalam aspek ekonomi, serta muncul ide-ide baru yang menjadi prosedur dalam penyelesaian konflik-konflik antar negara.

Ilmu Hubungan Internasional termasuk salah satu fokus kajian ilmu yang umurnya masih terbilang muda, hal ini dikarenakan fokus kajian tersebut baru diperkenalkan kepada publik Pasca Perang Dunia I yakni tahun 1919. Pada saat itu Ilmu Hubungan Internasional menjadi salah satu kajian akademik di Universitas Wales, Aberystwyth, Inggris (sekarang Universitas Aberystwyth). Woodrow Wilson juga ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu HI pada saat itu dengan memprakarsai lembaga internasional dengan tujuan untuk mencapai perdamaian di dunia, lembaga tersebut adalah Liga Bangsa-Bangsa (LBB). David Davies juga turut membantuk perkembangan tersebut dengan memberikan bantuan materil kepada Universitas Wales untuk membentuk sebuah lembaga bernama *The Woodrow Wilson Chair*, lembaga ini memiliki tujuan untuk mempelajari latar belakang konflik, serta dampak negatif dari hal tersebut (Yessi, 2012).

Study of international relations pada awalnya memiliki makna sebagai studi yang membahas mengenai hubungan antar negara saja, dalam hal ini interaksi yang terbatas pada permasalahan perang dan keamanan (tradisional). Pada akhirnya Ilmu Hubungan Internasional mulai mengalami perkembangan ke arah yang lebih kompleks dengan pembahasan-pembahasan yang mengarah pada hubungan antar aktor negara maupun non negara (seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional), individu dalam sistem internasional, diplomasi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya Ilmu Hubungan Internasional memuat segala jenis hubungan yaitu "*harmoni ataupun konflik, damai ataupun perang, sipil ataupun militer, politis maupun ekonomis*" (Johari, 1985). Ilmu HI juga memiliki sebutan lain di setiap tempat yang berbeda seperti *international politics*, *international studies*, dan *global politics*.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia pada akhirnya tidak lagi hanya terfokus pada permasalahan tradisional seperti peperangan dan keamanan. Pada akhirnya muncul perhatian-perhatian baru terhadap beberapa permasalahan

yang disebut dengan “*non traditional issues*”, permasalahan ini berfokus terhadap beberapa hal seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, kesehatan, pencegahan penyebaran narkoba, kelestarian lingkungan, bahkan permasalahan mengenai *gender inequalities* (Mallavarapu, 2008). Pada penelitian kali ini peneliti akan berfokus pada salah satu permasalahan yang termasuk dalam “*non traditional issues*” . Permasalahan tersebut adalah mengenai gender, terutama tentang peranan wanita yang harus lebih diperhatikan dalam konteks hubungan internasional. Oleh karena itu, permasalahan mengenai gender dan feminisme dalam hubungan internasional menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas perkembangannya.

METODE

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini. Dalam buku “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*” yang ditulis oleh John W. Creswell disebutkan bahwa, metode kualitatif merupakan pendekatan yang melakukan penjelasan deskriptif terhadap suatu permasalahan dengan data-data terkait, melakukan pendalaman yang mendetail terkait subjek penelitian, serta menunjukkan kelebihan maupun potensi dari penelitian yang dilaksanakan (Creswell & Creswell, 2018).

Studi Kepustakaan atau *literature study* menjadi metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian kali ini, dalam hal ini peneliti mencari data yang dianggap relevan dari berbagai sumber bacaan. Beberapa sumber bacaan yang digunakan oleh peneliti dalam metode pengumpulan data ini adalah buku, jurnal, arsip, dokumen penulisan, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Dalam Hubungan Internasional, isu mengenai gender merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Keadaan tersebut dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dan politik internasional lebih identik dengan pria, hal ini dikarenakan sejauh ini sebagian besar tentara, formasi staff yang berada di badan internasional, diplomat, serta beberapa aktor lainnya dalam hubungan internasional didominasi oleh laki-laki. Kenyataan tersebut diperkuat juga dengan hanya sedikit jumlah pemimpin negara yang merupakan perempuan, sehingga pada akhirnya perempuan dianggap memiliki peran yang minim dalam konteks hubungan antar negara dan politik luar negeri (Djelantik, 2009).

Pada dasarnya gender berbeda dari interpretasi langsung kepada perempuan dan laki-laki, hal ini dikarenakan gender termasuk pada arti sosial yang membedakan feminitas dengan maskulinitas, sedangkan terdapat laki-laki dan perempuan yang merupakan pembagian dalam arti biologis (jenis kelamin). Namun, pada akhirnya masyarakat lebih sering menganggap bahwa gender merupakan sebutan lain dari jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Pada akhirnya feminisme ini digunakan sebagai gerakan sosial bagi aliran-aliran yang dianut oleh kaum feminin, tentu saja dengan tujuan untuk meraih kesetaraan dengan berbagai penafsiran yang berbeda (Nugroho H. W., 2004).

Hubungan Internasional dan Isu Gender di Negara Berkembang

Di Indonesia, keterwakilan perempuan pada Anggota Badan Legislatif (DPR RI) pada periode 2019 hingga 2024 saat ini berjumlah sekitar 118 anggota dari total 575 anggota yang terpilih (sekitar 20,5%) (DPR RI, 2019). Jumlah tersebut memang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yakni pada periode 1999-2004 dengan 45 perempuan dari 500 anggota DPR (9%), periode 2004-2009 dengan 61 perempuan dari 500 anggota DPR (11,09%), periode 2009-2014 dengan 101 perempuan dari 560 anggota DPR (18,04%), serta pada periode tahun

2014-2019 dengan jumlah 97 perempuan dari 560 anggota DPR (17,32%) (Ditpolkom Bappenas, 2018).

Walaupun jumlah keterwakilan perempuan pada kursi parlemen bertambah setiap periodenya, namun pada kenyataannya mantan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merasa prihatin dengan jumlah tersebut dikarenakan belum pernah menyentuh angka 30 persen. Keprihatinan tersebut didasari oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah mewajibkan kuota minimal 30 persen bagi keterwakilan wanita di dalam partai politik maupun sebagai anggota legislatif (DPR RI, 2018). Diharapkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia mulai meneladani perjuangan yang telah dilaksanakan oleh R.A. Kartini, karena beliau adalah perempuan Indonesia dapat merasakan beberapa kenikmatan seperti mengenyam pendidikan dan partisipasi aktif dalam bidang politik.

Indonesia sendiri memiliki berbagai regulasi yang membahas mengenai gender, beberapa contohnya adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Implementasi dari undang-undang tersebut adalah melalui Intruksi Presiden No. 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dalam pelaksanaannya pula Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan No. 132 tahun 2003 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Djelantik, Gender dan Pembangunan di Dunia Ketiga, 2008). Hingga saat ini, Indonesia masih terus berusaha untuk melahirkan kesetaraan dalam gender dan menghilangkan eksploitasi ataupun kekerasan terhadap wanita.

Isu mengenai gender dan feminisme di negara berkembang dapat kita lihat secara nyata juga di negara Thailand, dalam hal ini mengingat statistik yang menunjukkan bahwa 70% pengunjung pria yang berwisata ke Thailand merupakan turis seks. Di Thailand kita mengenal *sex tourism* yang menjadi permasalahan besar bagi perempuan sebagai pekerjaannya, dalam hal ini terdapat beberapa distrik prostitusi tertentu di wilayah Bangkok dan Pattaya. Para wanita bekerja pada beberapa agensi, hal tersebut memang menjadi keterpaksaan bagi mereka dikarenakan pengangguran perempuan adalah masalah yang cukup besar di Thailand (Tourism Teacher, 2020). Pekerja perempuan yang berada pada *sex tourism* memang melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan pemasukan dan upah demi kelanjutan hidupnya, namun tetap saja terdapat agensi (mucikari) yang menjadi perantara atau “wadah” bagi mereka. Pada akhirnya keberadaan *sex tourism* yang ada di Thailand merupakan sebuah kegiatan eksploitasi terhadap wanita, hal ini dikarenakan tetap saja agensi tersebut yang akan mendapatkan pendapatan yang maksimal.

Permasalahan lainnya terkait feminisme yang ada di negara berkembang adalah kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga, terutama kasus-kasus penyiksaan yang dialami oleh pekerja migran suatu negara. Majikan-majikan yang tidak bertanggung jawab akan melihat pekerja rumah tangga mereka sebagai pembantu semata yang dengan bebas dapat mereka perlakukan sesuka hati, bahkan hingga beberapa majikan yang tak menganggap pekerja rumah tangganya adalah manusia. Contoh kasus kekerasan Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia adalah yang dialami oleh seseorang dengan inisial MH, dirinya merupakan TKW yang bekerja di Malaysia. MH ditolong dengan kondisi tubuh yang sudah penuh dengan luka-luka hasil siksaan dari majikannya, dalam hal ini terdapat beberapa luka sayat di bagian dagu dan luka bakar di sekitar wajah, badan, kaki, serta dada (Surya, 2020).

Aliran-Aliran dalam Feminisme

Feminisme tidak hanya berisi individu dengan pemikiran yang identik, karena pada kenyataannya terdapat beberapa aliran feminisme dengan berbagai paham-paham yang berbeda. Perbedaan aliran ini dapat kita pandang sebagai sebuah perkembangan dari feminisme

yang telah cukup menyebar di berbagai wilayah dunia, dalam hal ini termasuk upaya kaum feminim untuk memperjuangkan hak mereka dan mulai menghilangkan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek termasuk hubungan internasional.

Feminisme Liberal

Aliran feminisme ini memulai perkembangannya sejak abad ke-18 dengan landasan nilai-nilai liberalisme, dalam hal ini semua manusia baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dan tentu saja mereka memiliki kesempatan yang sama pula bagi perkembangan dirinya. Aliran Feminisme Liberal ini memiliki beberapa tokoh seperti Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), Margaret Fuller (1810-1850), dan Susan Anthony (1820-1906) (Umar, 2010).

Feminisme liberal memiliki pandangan utama yang mengatakan bahwa hak individu harus dilindungi secara setara, dalam hal ini feminisme liberal mengatakan bahwa sumber dari penindasan terhadap perempuan merupakan belum diperolehnya hak-hak perempuan, mengalami diskriminasi, serta terdapat perbedaan dalam kesempatan dan kebebasan dikarenakan mereka perempuan (Valentina & Ellin, 2007). Aliran ini memiliki fokus bahasan tentang pentingnya kebebasan individu, dalam hal ini juga laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari penindasan (tidak ada penindasan yang lebih mengarah pada kaum perempuan).

Aliran ini mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah seimbang, serasi, dan sama di hadapan publik, sehingga tidak ada suatu alasan yang lebih kuat untuk melakukan penindasan terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan. Kaum feminisme juga mengatakan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan laki-laki dalam suatu ruang khusus dan publik. Niken Savitri menjelaskan bahwa setiap orang memiliki otonomi, dalam hal ini penekanan lebih diberikan pada perempuan dan laki-laki yang secara rasional setara sehingga harus memiliki kesempatan serupa dalam menerapkan pilihan rasional masing-masing (Savitri, 2006).

Mary Wollstonecraft merupakan seorang filsuf, penulis, dan tokoh feminisme liberal pada sekitar abad ke-18. Wollstonecraft selama hidupnya memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, dan lapangan pekerjaan. Tujuan dari gerakan tersebut adalah agar perempuan tidak hanya berdiam diri di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga serta sekadar menjadi instrumen kebahagiaan, kesempurnaan, dan kesenangan lelaki (Pranoto, 2010). Pandangan tersebut membuktikan bahwa publik memiliki pandangan yang salah terhadap kondisi alami perempuan yang dianggap memiliki kekurangan dalam intelektuas serta kemampuan fisik. Pada akhirnya “permainan” kembali pada konsep yang bernama stigma, dalam hal ini seluruh pejuang feminis ingin merubah cara pandang seluruh masyarakat (pria maupun wanita) agar memandang bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan yang serupa.

Feminisme liberal juga menganggap bahwa semua ketertindasan yang kaum wanita alami hingga saat ini diakibatkan oleh mereka yang mendapatkan akses berbeda dalam pendidikan, hal tersebut dianggap berakibat pada ketidakmampuan kaum perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki. Meski mendapatkan beberapa dukungan yang cukup besar dari pengikutnya, ternyata feminisme liberal masih mendapatkan beberapa kritikan sebagai berikut:

- Feminisme liberal kurang peduli terhadap realitas sosial ekonomi pada saat pembagian kerja secara seksual;
- Feminisme liberal menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan (*sameness*), mereka tidak mempertimbangkan realitas kelas dan penindasan yang terjadi dalam ideologi patriarki yang berdampak pada penerimaan nilai-nilai laki-laki dibandingkan melawannya melalui perspektif perempuan;

- Feminis liberal terkesan aliran yang eksklusif bagi perempuan berkulit putih, heteroseksual, serta mereka yang berada pada *mid-range class* (Sagala, 2007).

Pembahasan feminisme dalam aliran liberal ini cukup berkaitan dengan peranan wanita dalam Hubungan Internasional. Pandangan aliran feminisme liberal menyebutkan bahwa mereka menginginkan perempuan agar memiliki hak-hak yang sama dalam beberapa bidang seperti politik, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, dalam hal ini lebih banyak perempuan yang menduduki berbagai jabatan tinggi dalam lingkup nasional maupun internasional. Beberapa jabatan tersebut seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, pemimpin organisasi internasional, serta beberapa jabatan lainnya yang berpengaruh dalam politik internasional, beberapa perempuan yang saat ini tengah menjabat sebagai profesi-profesi tersebut adalah Halimah Yacob sebagai Presiden Singapura, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, Ngozi Okonjo-Iweala sebagai Direktur Jenderal *World Trade Organization* (WTO), dan masih banyak lagi.

Feminisme Radikal

Feminisme radikal memiliki dasar tujuan untuk melakukan perubahan besar-besaran (dari akarnya) pada suatu sistem, aliran ini mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Feminisme radikal menganggap bahwa ideologi patriarki dan keluarga menjadi penghalang serta sumber masalah, dalam hal ini terdapat seorang tokoh ayah sangat dominan dalam rumah tangga dengan menguasai seluruh anggota keluarga dengan segala regulasinya (Tong, 2009). Pada akhirnya aliran radikal ini merasa bahwa seluruh penindasan yang terjadi terhadap mereka merupakan dampak yang dihasilkan sejak awal dari dominasi laki-laki atas perempuan, dalam hal ini konsep keluarga atau rumah tangga menjadi salah satu bagian kecil dari penindasan yang menyebabkan keterbelakangan perempuan.

Penindasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan tindakan yang paling banyak dan menyebar di dunia, oleh karena itu bentuk penindasan ini sangat sulit untuk dihapuskan. Pada akhirnya penindasan-penindasan tersebut akan memberikan sebuah contoh atau model yang konseptual untuk memahami berbagai macam bentuk penindasan yang lainnya. (Tong, 2009). Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan pandangan bahwa peraturan, ideologi, dan keadaan yang terjadi tidak hanya perlu untuk dirombak, namun harus dicabut dari akar-akarnya sebagai mana aliran ini dinamakan “Feminisme Radikal”.

Feminisme Radikal menganggap bahwa pernikahan dan sistem keluarga pada akhirnya hanya kelanjutan dari sistem patriarki, oleh karena itu seharusnya perempuan dapat menolak perkawinan apabila mereka anggap hanya menguntungkan pihak laki-laki dan memperbesar dominasinya terhadap perempuan. Pada kenyataannya gerakan feminis radikal juga tidak hanya didasari oleh adanya dominasi dan penguasaan yang besar dari laki-laki selama ini, namun mereka juga ingin memiliki otoritas perempuan sebagai penguasa yang pada akhirnya sejajar dengan laki-laki. Pada keadaan tersebut perempuan menginginkan agar mereka memiliki kemandirian dalam segala elemen kehidupan, bahkan mereka dapat merubah sudut pandang terhadap bentuk keluarga sehingga Suami atau Ayah tidak selalu menjadi kepala rumah tangga.

Feminisme Radikal juga menjelaskan bahwa perempuan pada akhirnya harus terlepas dari dominasi laki-laki, dalam hal ini mereka tidak lagi bergantung kepada laki-laki dalam segala aspek. Bahkan terdapat pandangan “ekstrem” dalam aliran ini yang menyebutkan bahwa perempuan tidak hanya dapat merasakan kemesraan, kepuasan seksual, dan kehangatan dari laki-laki, karena mereka dapat mendapatkannya pula dari sesama perempuan. Pemahaman tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa perempuan tidak mungkin akan bisa berjuang melawan laki-laki apabila mereka meneruskan hubungannya dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya terdapat argumen bahwa menjadi “lesbian” adalah salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Elsa Gidlow menjadi salah satu tokoh feminis radikal yang

menganut paham “ekstrem” ini, dirinya berpendapat bahwa menjadi penyuka sesama jenis akan membuatnya terbebas dari dominasi laki-laki (Muslikatin, 2004).

Kate Millet, seorang tokoh feminis radikal mengatakan bahwa politik adalah seks. Pada akhirnya hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah politik, namun dalam hal ini berkaitan dengan suatu kelompok (pria atau wanita) yang pada akhirnya memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kelompok lainnya. Millet berpendapat bahwa ideologi patriarki melebih-lebihkan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, dalam hal ini laki-laki memiliki peran yang dominan dan maskulin sedangkan perempuan subordinat dan feminim. Pada akhirnya, dirinya berpendapat bahwa untuk menghancurkan dominasi laki-laki harus menghapuskan gender, peran, status, dan temperamen seksual (Tong, 2009).

Feminisme Marxis

Feminis Marxis tentu saja berdasarkan kepada teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx mengenai kritiknya terhadap sistem kapitalis yang dianggap eksploitatif, yakni teori Marxisme. Feminisme marxis memiliki persamaan dengan feminisme radikal yang sebelumnya, yakni sama-sama menjadikan konsep atau sistem keluarga sebagai salah satu permasalahannya. Feminisme Marxis memiliki pandangan bahwa dalam keluarga pun dapat muncul sistem *private property*, dalam hal ini seorang suami sebagai kepala keluarga disebut sebagai cerminan kaum borjuis yang memiliki kekuasaan terhadap nafkah, materi, hingga keluarga. Keadaan tersebut menjadikan suami memiliki posisi atau kekuasaan yang sangat kuat dalam keluarga, pada akhirnya istri dan anak-anak hanya dipandang sebagai kaum proletar yang bergantung pada materil yang diberikan borjuis.

Pada feminis marxis, perempuan ditempatkan hanya pada sektor domestik untuk mengurus rumah tangga yang tidak dihiraukan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, sedangkan laki-laki dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dikarenakan memiliki pekerjaan yang ekonomis dengan memberikan pemasukan terhadap keluarga yang sedang ia tanggung. Para feminis Marxis ingin pekerjaan yang mereka lakukan juga memiliki nilai yang ekonomis, hal ini dikarenakan agar laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama karena secara ekonomis keduanya memiliki pekerjaan dengan *value* yang jelas dan ekonomis (Keraf, 2010).

Pada intinya feminisme Marxis memiliki pandangan bahwa dalam kehidupan keluarga, posisi di antara Ayah dan Ibu sama dengan saling menghargai pada pekerjaan yang dilaksanakannya terutama walaupun Ibu hanyalah mengurus rumah tangga. Kaum feminisme Marxis tidak ingin ada dominasi laki-laki dalam suatu keluarga yang disebut dengan *private property*, mereka menginginkan agar tidak terdapat kelas-kelas yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan dengan nilai ekonomis yang dihasilkannya.

Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis merupakan aliran yang berpendapat bahwa “Tak akan ada pembebasan perempuan tanpa Sosialisme” , dalam hal ini kaum feminim ini ingin untuk menghilangkan keberadaan dari sistem kepemilikan. Dalam hal ini menginginkan penghapusan terhadap lembaga perkawinan yang memberikan legalisir terhadap kepemilikan pria atas harta dan istri, hal ini berkaitan dengan ide Marx yang selalu menginginkan keadaan masyarakat yang tanpa kelas dan menghiraukan perbedaan gender yang ada. Pada akhirnya sosialis ini menggabungkan paham sebelumnya agar perempuan dapat memberikan peranan maksimal dalam beberapa aspek seperti ekonomi, kesempatan kerja, kepemilikan, keterlibatan dalam politik, dan sebagainya.

Feminisme sosial juga ternyata memiliki sedikit perbedaan dengan Marxis, yakni mereka berpendapat bahwa ideologi patriarki telah muncul sebelum kapitalisme lahir dan akan selalu “eksis” walaupun kapitalisme berakhir. Feminisme sosialis berpendapat terdapat dua

permasalahan utama atau sumber penindasan yang dirasakan oleh perempuan, dua permasalahan tersebut adalah kapitalisme dan patriarki yang keduanya berkaitan (Puspitawati, 2009). Perempuan perlu untuk segera menghilangkan stigma-stigma negatif yang ada di diri mereka dan mulai tampil dalam bidang yang mereka tuntut, namun tentu saja mereka perlu mempersiapkan beberapa hal seperti pendidikan.

Feminisme Islam

Margot Badran dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* mengatakan bahwa pada abad ke-20 mulai terdapat kesadaran tentang ketidakadilan gender yang dialami perempuan, hal ini dibuktikan dengan tulisan wanita Muslimah abad ke-19 hingga ke-20 dalam beberapa bentuk seperti surat, memorial pribadi, novel, buku, artikel, esai, puisi, dan sebagainya. Perkembangan berlanjut saat perempuan menengah-atas mulai memiliki akses penuh dalam publik dan berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga para Feminis Muslimah mulai menulis mengenai gender dengan berbagai tema seperti eksploitasi perempuan, sistem patriarki, misogini, serta kekerasan seksual terhadap perempuan (Ilyas, 1997).

Feminisme dalam agama Islam memiliki ciri khas yang berupa dialog intensif antara keadilan dan kesederajatan yang ada dalam Hadits, Al-Quran, dan tradisi keagamaan dengan perlakuan terhadap muslimah yang ada di suatu masyarakat (Rachman, 2005). Pada akhirnya feminisme Islam berkembang untuk menjawab permasalahan perempuan yang menyangkut mengenai ketidaksejajaran dan ketidakadilan, mereka menganggap bahwa masih terdapat ideologi patriarki dalam penafsiran yang terjadi sehingga menghasilkan penafsiran yang cenderung mendukung kepentingan laki-laki, atau menjadikan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki (Yusuf, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa Feminisme Islam memiliki akar masalah yang sama yakni ideologi patriarki, namun dalam hal ini aliran feminisme di Islam tidak ingin menjadikan laki-laki sebagai lawan yang harus “ditumpas” agar mereka mendapatkan kebebasan dan kesetaraan. Feminisme aliran ini juga sangat bertumpu kepada Al-Quran, Hadits, dan beberapa tradisi agama yang menjadikan aliran ini memiliki pula hubungan langsung dengan Penciptanya. Feminisme Islam mencoba menghilangkan patriarki, menghilangkan anggapan bahwa perempuan adalah “makhluk kedua”, serta memperjuangkan hak-hak kesetaraan mereka dengan laki-laki.

Black Feminism

Aliran feminisme ini lebih berfokus pada adanya perbedaan lainnya yang cukup menonjol, yakni merujuk pada perbedaan warna kulit dan ras. Seperti yang kita tahun orang-orang yang memiliki ras berkulit hitam menjadi minoritas di negara-negara Barat dan seringkali mendapatkan tindakan rasis baik pria maupun wanita, oleh karena itu para wanita berkulit hitam memulai aliran feminisme ini sebagai bentuk upaya dalam mengatasi dua permasalahan besar yakni seksisme dan tentu saja rasisme (Nugroho, 2008). Perbedaan lain yang terdapat pada wanita berkulit hitam menjadikan mereka membentuk aliran ini.

Black Feminism merupakan aliran yang memiliki permasalahan sangat kompleks, hal ini dikarenakan mereka perlu untuk melawan paham seksisme dengan segala seluk-beluk di dalamnya hingga melawan setiap bentuk rasis dan diskriminasi terhadap warna kulit mereka. Pembahasan mengenai aliran feminisme ini juga sangat berkaitan dengan eksistensi perempuan berkulit hitam dalam hubungan internasional, hal ini dikarenakan memang masih sedikit perempuan berkulit hitam yang menjadi pemimpin dari berbagai lembaga internasional. Salah satu contoh perempuan berkulit hitam yang menjadi pemimpin suatu lembaga internasional adalah Ngozi Okonjo-Iweala sebagai Direktur Jenderal *World Trade Organization* (WTO), dirinya adalah seorang wanita berkebangsaan Nigeria yang sebelumnya menjabat sebagai

Menteri Keuangan Nigeria sebanyak dua kali dan sempat pula menjabat sebagai *managing director* di *World Bank* dengan tanggung jawabnya untuk mengawasi transaksi besar senilai 181 triliun dolar Amerika Serikat (Putri, 2021).

Feminisme Postmodern

Feminisme postmodern merupakan aliran feminisme yang dipengaruhi kuat oleh berbagai aliran filsafat modern seperti eksistensialisme dan dekonstruksi, dalam hal ini membahas mengenai kenyataan yang dianggap sebuah penyampaian yang sempurna melalui lisan, tulisan, bahkan gambaran. Aliran ini pada dasarnya menerima adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tetapi dominasi yang berada pada pihak laki-laki harus di konstruksi ulang melalui perubahan pada realitas, narasi, serta bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Secara umum, aliran ini ingin mengubah dominasi pria secara mendasar melalui perubahan stigma di masyarakat melalui jalur-jalur seperti tulisan, lisan, dan gambaran.

Feminisme aliran ini sebenarnya tidak ingin hak untuk menjadi serupa dengan laki-laki, namun mereka ingin merekonstruksi hal yang selama ini telah menjadi interpretasi masyarakat umum terhadap perempuan. Aliran ini ingin agar identitas perempuan disampaikan oleh mereka sendiri sebagai manusia yang bebas, bukan oleh pihak laki-laki (Nugroho, 2008). Aliran feminisme ini memiliki tujuan besar juga dalam mempromosikan pluralisme di samping merekonstruksi interpretasi mereka, dalam hal ini mereka masih menganggap bahwa laki-laki dan ideologi patriarki tetap menjadi penyebab utama sehingga perempuan kurang diperhatikan oleh karena itu. Pada akhirnya peran perempuan dianggap seolah-olah tiada dalam pembangunan segala aspek kehidupan, sehingga pada akhirnya mereka harus merubah interpretasi tentang mereka sebagai perempuan.

Pandangan feminisme postmodern terhadap keadaan mereka yang dianggap seolah-olah tiada juga berkaitan dengan dunia internasional, dalam hal ini mereka yang memiliki beberapa peranan yang cukup krusial dalam hubungan antar negara cenderung masih kurang dikenal oleh masyarakat dikarenakan perbandingan jumlah dan stigma dasar kepada kaum feminim. Untuk itu, berikut adalah beberapa perempuan yang memiliki peranan dalam dunia hubungan internasional:

- Gro Harlem Brundtland, beliau adalah wanita pertama dan individu termuda yang menjadi perdana menteri di Norwegia dan dirinya memegang peranan penting dalam mempopulerkan gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada 1983 PBB membentuk Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan yang sosok pemimpinnya adalah Brundtland. Pada akhirnya beliau terus aktif dalam komisi tersebut hingga mengikuti KTT Bumi Rio pada tahun 1992, pembangunan berkelanjutan akhirnya mendapatkan perhatian besar yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik global pada abad ke-21. Peran besar Brundtland adalah pada bagian konsep pembangunan berkelanjutan.
- Mabel Newcomer, beliau merupakan seorang ekonomi dan penulis besar sejak tahun 1917 hingga 1957. Newcomer juga menjabat sebagai Presiden wanita pertama *American Economic Association* dan menjadi konsultan Departemen Keuangan AS. Newcomer juga datang sebagai perwakilan Amerika Serikat pada Konferensi Moneter dan Keuangan PBB di Bretton Woods. Peran besar Newcomer berada pada aspek ekonomi dunia, dirinya mengabdikan diri dalam perkembangan perekonomian.
- Jody Williams, beliau menjadi salah satu pendukung perdamaian paling besar di dunia selama beberapa dekade. Pada 1997, dirinya bersama *International Campaign to Ban Landmines* (ICBL) menerima nobel perdamaian dalam pelarangan ranjau darat. Williams terus mengabdikan diri untuk menciptakan perdamaian dunia, dirinya juga menjadi ketua bersama *Nobel Women's Initiative* dan bergabung dengan sesama

penyintas kekerasan seksual dalam melakukan interaksi dengan para pemimpin dunia untuk mengakhiri kekerasan seksual dan konflik.

- Doris Stevens, beliau merupakan pejuang hak perempuan yang menjadi organisator serta pemimpin dari gerakan hak pilih di Amerika. Stevens pernah ditangkap beberapa kali oleh pihak kepolisian, namun dirinya tidak “kapok” untuk tetap komitmen pada tujuannya. Stevens ditunjuk sebagai ketua pertama dari *Inter-American Commission of Women* (IACW) yang menjadi lembaga antar pemerintah untuk memastikan pengakuan hak perempuan, selama kepemimpinannya organisasi ini berfokus untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Salah satu produk yang Stevens hasilkan adalah melalui Konvensi Kebangsaan Perempuan yang menghasilkan hak berupa, perempuan dapat mempertahankan kewarganegaraannya apabila dirinya menikah dengan seorang pria dari kebangsaan lain.
- Lise Meiner, beliau merupakan seorang fisikawan asal Austria yang memiliki pengaruh besar dalam aspek sains dan politik. Dirinya berhasil menciptakan penemuan yang pada akhirnya melahirkan bom atom yang merupakan senjata andalan pada Perang Dunia II, namun setelah melihat potensi buruk tersebut akhirnya dia menolak untuk melakukan pengembangan kembali penemuannya tersebut dan pada akhirnya hanya melihat kepintarannya digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.
- Ngozi Okonjo-Iweala, seperti yang telah dibahas, dirinya merupakan mantan menteri asal Nigeria dan seorang direktur keuangan yang pada akhirnya Ngozi Okonjo-Iweala berhasil terpilih menjadi Direktur Jenderal atau pimpinan dari organisasi *International Monetary Fund* (IMF) (Council on Foreign Relations, 2019).

Enam perempuan di atas merupakan contoh nyata bahwa sebenarnya perempuan memiliki peran yang besar dalam hubungan internasional, bahkan mereka menduduki beberapa posisi krusial yang berdampak pada perpolitikan dan perekonomian dunia. Pada akhirnya peranan perempuan dalam hubungan internasional tidak dapat dipandang sebelah mata, hal ini dikarenakan wanita diharapkan untuk memiliki potensi yang sama seperti pria hingga pada akhirnya dapat mewujudkan konsep *gender equality*.

SIMPULAN

Isu mengenai gender dan feminisme merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari studi hubungan internasional, hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya merupakan sesuatu yang sangat kompleks hingga melewati batas-batas negara (internasional). Nilai-nilai di dalam feminisme secara umum memberikan tuntutan agar wanita dipandang pada posisi yang sama dengan laki-laki, termasuk pada pekerjaan, jabatan, politik, dan lain sebagainya. Perempuan memang memiliki tingkat keikutsertaan yang lebih rendah daripada laki-laki dalam dunia internasional, namun terdapat beberapa perempuan yang memiliki kemampuan lebih sehingga dapat menjadi seorang pejabat, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, menteri, bahkan direktur jenderal suatu organisasi internasional dan pada akhirnya memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan hidup masyarakat internasional.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada konteks gender dan feminisme menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks, dalam hal ini terjadi beberapa tindakan yang merugikan perempuan seperti penyalahgunaan, pemaksaan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut perlu untuk diperhatikan, hal tersebut bertujuan agar perempuan dapat berkembang menuju arah yang lebih baik agar dipandang setara dengan laki-laki.

Ideologi patriarki menjadi “musuh” atau permasalahan utama yang dibahas dalam setiap aliran feminisme. Keadaan tersebut memang wajar terjadi, dikarenakan ideologi patriarki menjadikan laki-laki sebagai kekuatan dominan yang pada akhirnya mereka memiliki kelebihan-kelebihan untuk memaksakan kekuasaannya kepada perempuan. Pada akhirnya para kaum feminis ingin memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan perempuan, dalam hal ini perempuan terus berjuang untuk menciptakan *gender equality*.

REFERENSI

- Amsir, A. A. (2021). Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern. *Jurnal Sulesana*, 15 (1), 53.
- Council on Foreign Relations. (2019, Maret 8). *Six Woman Who Shaped the Contemporary World Order*. Retrieved from crf.org: <https://www.cfr.org/blog/six-women-who-shaped-contemporary-world-order>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Edition*. SAGE Publications.
- Ditpolkom Bappenas. (2018, Oktober 30). *Jalan Keterwakilan Perempuan*. Retrieved from ditpolkom.bappenas.go.id:
<http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=784#:~:text=Pada%20Pemilu%202014%2C%20dari%20total,yang%20memperebutkan%20575%20kursi%20DPR>.
- Djelantik, S. (2008). Gender dan Pembangunan di Dunia Ketiga. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (2), 232-251.
- Djelantik, S. (2009). Redefinisi Ilmu Hubungan Internasional dalam Perspektif Gender. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 37-38.
- DPR RI. (2018, April 25). *Ketua DPR Prihatin Keterwakilan Perempuan Belum 30 Persen*. Retrieved from [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id):
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20546/t/Ketua+DPR+Prihatin+Keterwakilan+Perempuan+Belum+30+Persen>
- DPR RI. (2019, Oktober 3). *Isu Gender akan Diperjuangkan*. Retrieved from [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id):
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26098/t/javascript>
- Ilyas, Y. (1997). *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johari, J. (1985). *International Relations and Politics (Theoretical Perspectives)*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Keraf, S. A. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Mallavarapu, S. (2008). *International Relations Theory and Non-Traditional Approaches to Security*. New Delhi: WISCOMP.
- Muslikatin, S. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nugroho, H. W. (2004). *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-Laki Suatu Tinjauan Filsafat Moral)*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi: Pengarus-Utamanya di Inonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pranoto, N. (2010). *Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara*. Yogyakarta: Kasinus.
- Puspitawati, H. (2009). *Teori Gender dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia.
- Putri, R. D. (2021, Februari 21). *Mengenal Ngozi Okonjo-Iweala, Dirjen Perempuan dan Afrika Pertama WTO*. Retrieved from [Tirto.id](https://tirto.id): <https://tirto.id/mengenal-ngozi-okonjo-iweala-dirjen-perempuan-afrika-pertama-wto-gar4>

- Rachman, B. M. (2005). *Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan, Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Sagala, R. V. (2007). *Pergulatan Feminisme dan HAM*. Bandung: Institut Perempuan.
- Savitri, N. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Surya, D. (2020, Desember 4). *TKI di Malaysia disiksa, "luka sayat dan bakar di sekujur tubuh", mengapa kekerasan terus berulang?* Retrieved from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153)
- Tong, R. P. (2009). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tourism Teacher. (2020, Mei 21). *The top sex tourism countries in the world*. Retrieved from [tourismteacher.com: https://tourismteacher.com/sex-tourism-countries/](https://tourismteacher.com/sex-tourism-countries/)
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Valentina, R., & Ellin, R. (2007). *Pergulatan Feminisme dan HAM, HAM untuk Perempuan, HAM untuk Keadilan Sosial*. Bandung: Institut Perempuan.
- Yessi, O. (2012). Perkembangan Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*, 3 (2), 3-4.
- Yusuf, M. A. (2010). *Wacana Gender di Indonesia: Antara Muslim Feminis dan Revivalis*. Kediri: STAIN Kediri Press.